



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
NOMOR: 01/ket/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

- Menimbang :**
- Dalam rangka keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekeretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Buru Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Onformasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;

- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi publik di Komisi Informasi Daerah.
4. PPID bertugas :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikn salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah;
 - e. Menetapkan dan memuthakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan bawaslu Kabupaten Buru;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayanai pemohon Informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada PPID;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikn Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 - b. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA

: PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk ;

- a. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Buru tahun Anggaran 2020
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 8 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

KETUA,



FATHI HARIS THALIB, S.Sos. MPA

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI DI
LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BURU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Fathi Haris Thalib, S.Sos. MPA	Ketua Bawaslu Kab. Buru	Pembina PPID
2.	Ambran Sakula, SH	Anggota Bawaslu Kab. Buru	Tim Pertimbangan PPID
3.	M. Hamdani Jafar, SE	Anggota Bawaslu Kab. Bur	Tim Pertimbangan PPID
4.	Lukman, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Buru	Atasan PPID
5.	Ilma Wakano, SH	BPP Bawaslu Kab. Buru	PPID
6.	Zainal A. Tuankotta	Staf Subag HPPS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Dadang Suherman, S.Pi	Staf Subag Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Fandi Saleh Bin Thalib	Staf Subag Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Yodiawati	Staf Subag Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Arba Abdullah, S.Kom	Staf Subag HPPS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Jahra Koranelauw, S.Pd	Staf Subag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Zulfitri Yanto Jalil, S.Sos	Staf Subag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Rohani Tasijawa, SP	Staf Subag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 8 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

KETUA,



FATHI HARIS THALIB, S.Sos. MPA